



Signifikansi Peran Parpol dalam Pembangunan Menuju Terciptanya Masyarakat Madani Era Reformasi

Friska Ayu Anggraini^{1*}, Siti Fatimah¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 anggrainifriska30@gmail.com*

Abstract

The role of political parties (Parpol) in development towards the creation of civil society is an interesting and complex aspect in the political dynamics of a country. Civil society is a concept that embodies the ideals of a social order that is democratic, just and has a humanitarian perspective. In this context, the role of political parties has a significance that cannot be ignored. This research aims to explore various dimensions of the role of political parties in civil society development, as well as their implications for socio-political transformation in a country. The research method used is literature analysis and a qualitative approach to explore a deeper understanding regarding this phenomenon. The research results show that the role of political parties in civil society development has a very important dimension. First, political parties act as a forum for political representation of society, connecting people's interests with the process of making public policies. Second, political parties have the responsibility to build political awareness and public participation in the democratic process, form a critical mindset, and educate the public about their rights and obligations in the state. Third, political parties play a role in government supervision and accountability, ensuring transparency and fairness in government administration. However, the role of political parties in civil society development also faces a number of challenges. Among them are the practices of corruption and nepotism within the party which damage its image and integrity, as well as the entanglement of political parties in power dynamics which often leads to political polarization and social conflict. In conclusion, the role of political parties in developing civil society is a crucial factor in determining the direction and success of a country in achieving democratic and just ideals. Therefore, real efforts are needed to strengthen the role of political parties as development agents that are responsible, transparent and oriented towards the interests of the people, so that they are able to create a prosperous and civilized civil society.

Keywords: Political Party, Development, Civil Society

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 21, 2024

Revised

August 30,
2024

Accepted

September 10,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Partai politik (Parpol) memegang peran krusial dalam setiap proses demokrasi yang berjalan di suatu negara. Dalam konteks pembangunan menuju terciptanya masyarakat madani, peran Parpol menjadi semakin signifikan dan mendalam. Masyarakat madani merujuk pada sebuah masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesejahteraan, kebebasan sipil, dan partisipasi aktif dari seluruh warganya dalam proses pembangunan. (Masduki.2007:70-77). Parpol, sebagai institusi

yang mewakili beragam kepentingan dan aspirasi masyarakat, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, signifikansi peran Parpol dapat dipahami melalui beberapa aspek yang mencakup pengawalan proses politik, pembentukan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan kohesi sosial. (A Gau Kadir, 2014:132-136)

Pertama-tama, Parpol memiliki peran penting dalam mengawal proses politik menuju terciptanya masyarakat madani. Melalui proses pemilihan umum, Parpol menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengungkapkan pilihannya dan memilih para pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. Dengan demikian, Parpol menjadi pen jembatan antara keinginan masyarakat dan mekanisme politik formal. (Muhammad Ihsan, 2012:132-136). Selain itu, Parpol juga berperan dalam pembentukan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan menjadi bagian dari lembaga legislatif, Parpol memiliki akses dan kewenangan untuk menginisiasi, membahas, dan mengesahkan undang-undang serta kebijakan-kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penting bagi Parpol untuk menjalankan perannya dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mendorong terciptanya masyarakat madani yang inklusif dan berkeadilan. (Mochamad Parmudi, 2017:195-210)

Selain itu, Parpol juga memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan. Melalui program-program pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan advokasi masyarakat, Parpol dapat membantu meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif warga dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Dengan demikian, Parpol bukan hanya menjadi pemegang kekuasaan, tetapi juga mitra dalam upaya membangun masyarakat yang dinamis dan responsif terhadap perubahan. Terakhir, Parpol juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial dalam masyarakat. Dengan menjadi forum bagi berbagai kepentingan politik dan ideologis, Parpol memiliki potensi untuk menjadi mediasi dalam penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Melalui dialog dan negosiasi, Parpol dapat membantu menciptakan ruang bagi kerjasama antarberbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama menuju masyarakat madani yang lebih baik.

Secara keseluruhan, peran Parpol dalam pembangunan menuju terciptanya masyarakat madani sangatlah signifikan. Melalui pengawalan proses politik, pembentukan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial, Parpol dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, penting bagi Parpol untuk terus melakukan introspeksi dan reformasi internal guna meningkatkan kualitas pelayanan politiknya serta memperkuat legitimasinya sebagai representasi yang sah dari kehendak rakyat. (Suryani Yani, 2015:51-64)

Namun pada prakteknya masih ditemui banyak hal yang menjadi penghalang optimalnya peran parpol dalam membangun masyarakat madani, seperti masih eratnya praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang menjadi tradisi turun temurun yang ada didalam kubu sebuah parpol itu sendiri. (Dwi Martiningsih, 2018:34-37) Hal tersebutlah yang menjadi menarik untuk diteliti dimana adanya parpol dapat menunjang berkembangnya masyarakat madani, namun yang kita lihat saat ini dimana pada masa Reformasi, partai politik malah menunjukkan adanya kemundurannya dalam mengembangkan masyarakat madani sesuai fungsi dan peranannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan sumber referensi dari buku, jurnal, internet, dan sumber referensi lainnya untuk mendukung

pembuatan jurnal, Jenis penelitian ini adalah "penelitian kualitatif literatur" atau "penelitian kualitatif deskriptif". Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah pada analisis dan interpretasi teks-teks yang dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut.

Dalam penelitian kualitatif literatur, peneliti biasanya tidak mengumpulkan data primer secara langsung melalui observasi atau eksperimen, melainkan mengandalkan data sekunder yang telah ada dalam bentuk tulisan, analisis, atau dokumentasi. Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali wawasan, pola, dan makna dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis teks dari literatur-literatur lokal yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengenalan Konsep Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani telah disosialisasikan di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa *civil society* ini. (Bahtiar Efendi,1999:248). Dalam Bahasa Arab sipil adalah madani, hukum sipil adalah qonun madani, sedangkan kanun berasal dari Bahasa Yunani yang mengandung arti pengertian. (Hujair AH,2003:42). Sedangkan menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah system social yang subur yang diasakan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan dan kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. (M Dawam Rahardjo,1999:23). Konsep masyarakat madani telah menjadi pusat perhatian dalam diskusi tentang pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Masyarakat madani bukanlah sekadar istilah kosong, melainkan sebuah gagasan yang mengandung makna mendalam tentang tatanan sosial yang diidamkan oleh banyak negara yang ingin berkembang menuju arah yang lebih demokratis, beradab, dan berkeadilan. Istilah ini pertama kali diungkapkan dalam literatur klasik Islam dan kemudian diperbarui dan diperluas maknanya oleh para pemikir modern. (Rudiawan Sitoras,2012)

Secara umum, konsep masyarakat madani tidak terlalu jauh berbeda dengan konsep masyarakat sipil, yakni berintikan adanya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hanya saja, jika masyarakat sipil melulu bicara dalam paradigma politik, konsep masyarakat madani lebih berperspektif keagamaan. (Abdurahman Wahid,1998)

Pada dasarnya, masyarakat madani adalah sebuah konsep yang menggambarkan suatu entitas sosial yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan partisipasi aktif dari semua warga negara dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Istilah ini juga mencerminkan aspirasi untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang inklusif, di mana pluralitas dihargai, konflik diselesaikan secara damai, dan semua warga memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya. (Andi Jufri,2020:285-307)

Salah satu karakteristik utama dari masyarakat madani adalah adanya keseimbangan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Negara bertanggung jawab untuk menjamin keadilan sosial, memastikan perlindungan hak asasi manusia, dan memberikan pelayanan publik yang merata kepada seluruh warga negara. Sementara itu, pasar berperan sebagai mesin ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan, tetapi diawasi dan diatur oleh negara untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidaksetaraan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat sipil, yang terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan inisiatif masyarakat, memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja negara dan pasar, menyuarakan kepentingan rakyat, dan memperkuat partisipasi politik dan sosial. (Saefur Rohmah,2003)

Lebih jauh lagi, masyarakat madani juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan supremasi hukum. Demokrasi dipandang sebagai sistem politik yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan pemilihan pemimpin secara bebas dan adil. Pluralisme mengakui keberagaman budaya,

agama, dan pandangan politik sebagai aset yang memperkaya kehidupan sosial dan politik suatu negara. Sementara itu, supremasi hukum menjamin bahwa semua warga negara tunduk pada aturan yang sama dan adil, serta menegakkan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam semua lapisan masyarakat. (H Fahroji dan Marwan Setiawan, 2022)

Dalam konteks globalisasi dan tantangan kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, konsep masyarakat madani menjadi semakin relevan dan penting. Dengan mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari masyarakat madani, negara-negara dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas politik, serta kesejahteraan sosial yang merata. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat internasional. Dengan demikian, konsep masyarakat madani bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga tantangan yang harus diwujudkan bersama-sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. (Abu Khaer, 2014)

2. Peran Parpol dalam Pembangunan Masyarakat Madani

Istilah partai politik membawa gagasan pada suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya yang memiliki orientasi, serta nilai-nilai yang sama yakni untuk memperoleh kekuasaan politik. (Meriam Budiardjo, 2008)

Partai politik (Parpol) memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembangunan menuju terciptanya masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan beradab. Sebagai institusi politik yang mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, Parpol memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa proses pembangunan yang dilakukan berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu peran utama Parpol dalam masyarakat madani adalah sebagai perwakilan dan pengemban aspirasi rakyat. Dalam sistem demokrasi, Parpol menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengungkapkan pilihannya dan memilih para pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. (Mansur Hidayat, 2008)

Selain itu, Parpol juga memiliki peran krusial dalam pembentukan kebijakan publik yang mendukung terwujudnya masyarakat madani. Sebagai bagian dari lembaga legislatif, Parpol memiliki kewenangan untuk menginisiasi, membahas, dan mengesahkan undang-undang serta kebijakan-kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, Parpol memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mengakomodasi beragam kepentingan masyarakat, mempromosikan keadilan sosial, dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. (Triono Triono, 2017)

Selain menjadi perwakilan dan pembentuk kebijakan, Parpol juga memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui program-program pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan advokasi masyarakat, Parpol dapat membantu meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif warga dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Dengan memberdayakan masyarakat, Parpol membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat madani. (Muhammad Sulthon, 2013:483-502)

Selain itu, Parpol juga berperan dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial dalam masyarakat. Dengan menjadi forum bagi berbagai kepentingan politik dan ideologis, Parpol memiliki potensi untuk menjadi mediasi dalam penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Melalui dialog dan negosiasi, Parpol dapat membantu menciptakan ruang bagi kerjasama antar berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama menuju masyarakat madani yang lebih baik. (Dadi Junaidi Iskandar, 2017:17-35)

Secara keseluruhan, peran Parpol dalam pembangunan masyarakat madani sangatlah penting dan signifikan. Melalui representasi yang baik, pembentukan kebijakan yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial, Parpol dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, Parpol perlu terus melakukan introspeksi dan reformasi internal guna meningkatkan kualitas pelayanan politiknya serta memperkuat legitimasinya sebagai representasi yang sah dari kehendak rakyat dalam membangun masyarakat madani yang lebih baik. (Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi,2021:90-91)

3. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi oleh Parpol dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Partai Politik (Parpol) dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan tidaklah sedikit. Meskipun memiliki peran yang signifikan dalam proses pembangunan, Parpol sering kali menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang dapat menghambat kemampuannya untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan meraih cita-cita masyarakat madani.(M Alpi Syahrin,2020:60-65)

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Parpol adalah masalah korupsi dan kurangnya akuntabilitas. Praktik korupsi yang melibatkan sejumlah anggota Parpol telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan membuat sulit bagi Parpol untuk memainkan peran mereka sebagai perwakilan yang jujur dan bertanggung jawab. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana partai serta dalam proses pembentukan kebijakan juga menjadi hambatan serius dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang bersih dan berintegritas. (Pandri S Itiyo,206)

Selain masalah korupsi, Parpol juga sering menghadapi tantangan dalam hal pluralisme dan inklusivitas. Dalam upaya untuk memenangkan pemilihan umum atau memperoleh dukungan politik, beberapa Parpol mungkin cenderung menggunakan retorika eksklusif atau melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, agama, atau etnis tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip masyarakat madani yang menghargai keberagaman dan mengupayakan inklusi sosial bagi semua warga negara. Oleh karena itu, Parpol perlu berjuang lebih keras untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mewakili kepentingan semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan ras, agama, atau latar belakang sosial. (Chaerul Umam,2019)

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Parpol adalah adanya polarisasi politik dan konflik ideologis. Dalam suasana politik yang semakin terpolarisasi, Parpol sering kali kesulitan untuk mencapai konsensus dalam pembentukan kebijakan dan menghadapi tekanan untuk mengambil sikap yang ekstrem atau radikal. Konflik ideologis antara partai politik yang berbeda juga dapat menghambat kemampuan Parpol untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama bagi masyarakat madani. (Akbar Tanjung,2019)

Selain tantangan internal, Parpol juga dihadapkan pada tantangan eksternal yang kompleks, termasuk pengaruh kekuatan eksternal, tekanan dari sektor swasta, dan tantangan global seperti perubahan iklim dan migrasi. Parpol sering kali harus berhadapan dengan tantangan ini tanpa sumber daya yang memadai atau dukungan politik yang memadai, yang dapat menghambat kemampuannya untuk bertindak secara efektif dalam mewujudkan visi masyarakat madani yang lebih baik. (Muhammad Arifin Nasution,2012)

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks, Parpol tetap memiliki potensi untuk memainkan peran yang signifikan dalam proses pembangunan menuju terciptanya masyarakat madani yang lebih baik. Dengan melakukan reformasi internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempromosikan inklusivitas dan pluralisme, serta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan,

Parpol dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mewujudkan cita-cita masyarakat madani yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. (Henry Arianto,2004)

4. Implikasi Signifikansi Peran Parpol dalam Masyarakat Madani

Peran Parpol dalam masyarakat madani memiliki implikasi yang sangat penting dan mendalam terhadap pembentukan tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Parpol, sebagai institusi politik yang mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang kuat dalam mendorong transformasi menuju masyarakat madani yang lebih baik. Salah satu implikasi utama dari peran Parpol adalah dalam mempengaruhi proses pembentukan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjadi bagian dari lembaga legislatif, Parpol memiliki akses dan kewenangan untuk menginisiasi, membahas, dan mengesahkan undang-undang serta kebijakan-kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. (Muhammad Jafar Aw,2015)

Implikasi lainnya dari peran Parpol dalam masyarakat madani adalah dalam mempromosikan partisipasi politik dan sosial yang lebih luas dan inklusif. Melalui program-program pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan advokasi masyarakat, Parpol dapat membantu meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif warga dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Dengan memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan, Parpol dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis di mana semua warga merasa memiliki peran yang penting dalam pembentukan masa depan negara mereka.(Muhammad Jafar Aw,2015). Selain itu, peran Parpol dalam masyarakat madani juga memiliki implikasi penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Sebagai forum bagi berbagai kepentingan politik dan ideologis, Parpol memiliki potensi untuk menjadi mediasi dalam penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Dengan memfasilitasi dialog dan negosiasi antara berbagai pihak, Parpol dapat membantu menciptakan ruang bagi kerjasama dan harmoni dalam mencapai tujuan bersama bagi masyarakat madani yang lebih baik. (Ramly Hutabarat,2005:20-25)

Namun, sementara peran Parpol memiliki implikasi yang positif dalam pembangunan masyarakat madani, juga penting untuk diakui bahwa Parpol juga dapat menghadapi tantangan dan risiko yang berpotensi merusak kredibilitas dan legitimasinya. Praktik korupsi, kurangnya akuntabilitas, polarisasi politik, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas adalah beberapa masalah yang dapat menghambat kemampuan Parpol untuk memainkan peran mereka dengan efektif dalam masyarakat madani.(Imam Yudhi Prasetya,2011:30-40). Secara keseluruhan, implikasi signifikansi peran Parpol dalam masyarakat madani sangatlah penting dalam upaya menciptakan tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Dengan melakukan reformasi internal, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mempromosikan inklusivitas dan pluralisme, Parpol dapat menjadi kekuatan positif yang mempercepat proses pembangunan menuju terciptanya masyarakat madani yang lebih adil, dinamis, dan berkelanjutan. (Anna Dameria Turnip,2016). Namun demikian, juga perlu diakui bahwa Parpol masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan yang dapat menghambat kemampuannya untuk memainkan peran mereka dengan efektif dalam masyarakat madani. Praktik korupsi, kurangnya akuntabilitas, polarisasi politik, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas adalah beberapa masalah yang perlu ditangani secara serius oleh Parpol untuk memperkuat legitimasinya sebagai perwakilan yang sah dari kehendak rakyat. (Masroer Jb dan Lalu Darmawan, 2016:35-64)

Secara keseluruhan, kesimpulan dari signifikansi peran Parpol dalam pembangunan menuju terciptanya masyarakat madani adalah bahwa Parpol memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan positif dalam mewujudkan visi masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan. Dengan melakukan reformasi internal, memperkuat

transparansi dan akuntabilitas, serta mempromosikan inklusivitas dan pluralisme, Parpol dapat menjadi mitra yang handal dalam upaya membangun masyarakat madani yang lebih baik bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Dalam konteks pembangunan menuju terciptanya masyarakat madani yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan, peran Parpol memiliki implikasi yang sangat signifikan dan mendalam. Parpol, sebagai lembaga politik yang mewakili berbagai kepentingan masyarakat, memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang penting dalam mendorong transformasi sosial dan politik yang positif. Melalui pengawalan proses politik, pembentukan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial, Parpol dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi masyarakat madani yang lebih baik. (Teguh Imansyah, 2012:90-95). Salah satu kesimpulan utama adalah bahwa Parpol memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam proses pembangunan masyarakat madani. Dengan menjadi wadah bagi berbagai kepentingan politik dan aspirasi masyarakat, Parpol dapat menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi semua warga negara. (Moch Muwafiqillah, 2022:40-41) Selain itu, kesimpulan yang penting adalah bahwa Parpol perlu memperkuat komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan supremasi hukum. Dengan mempromosikan partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif, serta mendorong dialog antara berbagai pihak, Parpol dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih harmonis dan demokratis di mana keberagaman dihargai dan konflik diselesaikan secara damai. (Abdul Kodiman dan Siti Fatimah, 2023:84-91)

REFERENSI

- Arianto, Henry. "Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia." *Lex Jurnalica* 1, no. 2 (2004): 17940.
- Aw, Muhammad Jafar. "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 2 (2015).
- Dwi Martiningsih, "Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme", *Jurnal Pusaka*, Vol 5, No 2
- Fahrurroji, H., dan Marwan Setiawan. *Masyarakat Madani: Pluralisme dan Multikulturalisme*. Zahir Publishing, t.t.
- Hidayat, Mansur. "Ormas Keagamaan dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Madani; Telaah Teoritik-Historis." *Komunitas; Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 1 (2008).
- Hutabarat, Ramly. "Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Masyarakat Dan Hukum Politik Yang Tidak Semantik." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 3 (2005): 20-25.
- Ihsan, Muhammad. "Hukum Islam Dan Moralitas Dalam Masyarakat Madani." *Al-Ahkam* 22, no. 1 (2012): 27-42.
- Imansyah, Teguh. "Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 90-95.
- Iskandar, Dadi Junaedi. "Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 17-35.
- Itinyo, Pandri S. "Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU. No. 2 Tahun 2011." *Lex Privatum* 4, no. 3 (2016).
- Jafar AW, Muhammad. "Peranan Partai Politik dalam Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik Volume 6, Nomor 2, Desember 2015* 6, no. 2 (2015).

- Jb, Masroer, dan Lalu Darmawan. "Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) Di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 2 (2016): 60–64.
- Jufri, Andi. "Masyarakat madani dan penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 285–307.
- Kadir, A. Gau. "Dinamika Partai Politik Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014): 30–36.
- Khaer, Abu. "Onsepsi Masyarakat Madani Dalam Manifesto Perjuangan Gerindra (Studi Kasus Tahun 2008–2014)," t.t.
- Kodiman, Abdul, dan Siti Fatimah. "Urgensi dan Peran Partai Politik dalam Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 84–91.
- Masduki, Masduki. "CIVIL SOCIETY: MENCARI TITIK TEMU ANTARA ISLAM DAN BARAT." *Al Qalam* 24, no. 2 (2007): 70–77.
- Meriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muwaffiqillah, Moch. "Revitalisasi Civil Society Melalui Teologi Sosial Pasca Dua Dasawarsa Reformasi." *Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 6, no. 2 (2022): 225–41.
- Nasution, Muhammad Arifin. "Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan." *Jurnal poleteia* 4 (2012).
- Parmudi, Mochamad. "Kebangkitan civil society di Indonesia." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 295–310.
- Prasetya, Imam Yudhi. "Pergeseran peran ideologi dalam partai politik." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011): 30–40.
- Rahardjo ,M Dawam, " *Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Penjajakan Awal*, " PARAMADINA, Vol 1, No 02, 1999
- Rochmat, Saefur. "Masyarakat madani: dialog Islam dan modernitas di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 9 (2003).
- Sitorus, Rudiawan. "Masyarakat madani dalam prespektif piagam madinah dan Piagam Jakarta (Suatu perbandingan)." Pascasarjana UIN-SU, 2012.
- Sulthon, Muhammad. "Penguatan Masyarakat Madani Melalui Dakwah Kewargaan." *Millah: Journal of Religious Studies*, 2013, 483–502.
- Suryani, Suryani. "Kontribusi NU sebagai Organisasi Civil Society dalam Demokratisasi." *Dialog* 38, no. 1 (2015): 51–64.
- Syahrin, M. Alpi. "Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan." *Eksekusi* 2, no. 2 (2020): 60–65.
- Tanjung, Akbar. "Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal (Studi Partai Politik Islam di Kabupaten Bone)." *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 1 (2019).
- Triono, Triono. "Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5, no. 2 (2017).
- Turnip, Anna Dameria, Irawan Suntoro, dan Yunisca Nurmalisa. "Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah." Lampung University, 2016.
- Umam, Chaerul. "PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK." Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Wahid, Abdurrahman, *Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*, dalam Budhy Munawar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta, Paramadina, 1994)
- Wijayanti, Septi Nur, dan Kelik Iswandi. "Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia." *Sasi* 27, no. 4 (2021): 90–91.

Copyright Holder:
© Friska Ayu Angraini & Siti Fatimah., (2024)

First Publication Right :
© Bulletin of Community Engagement

This article is under:
CC BY SA